

**KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS
DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh:

TALITHA AISYAH OKSAHADDINI

NBI : 1311800212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS
DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh:

TALITHA AISYAH OKSAHADDINI

NBI : 1311800212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS
DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

TALITHA AISYAH OKSAHADDINI

NBI : 1311800212

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a cursive name, all written over a horizontal line.

NPP/NIP : 20310180776

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS
DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN**

Oleh:

TALITHA AISYAH OKSAHADDINI

NBI : 1311800212

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Januari 2022
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 034/ST/FH/I/2022
Tanggal : 07 Januari 2022**

TIM PENGUJI:

Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S. H., M. M., M. H.

NPP : 196606181991031002

Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M. Kn.

NPP : 20310210840

Anggota : Ahmad Mahyani, S. H. M.H., M. Si.

NPP : 2031013069



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Talitha Aisyah Oksahaddini

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **“KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN”**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Talitha Aisyah Oksahaddini

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **“KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN”**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Talitha Aisyah Oksahaddini

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Menurut pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Talitha Aisyah Oksahaddini

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul “**KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN**”

dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah sampai pada titik ini dan telah menyelesaikan skripsi diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

- Papa dan Mama, Heddy Gigih Prahantonuso dan Sri Agustini Poniawati yang selama ini selalu memberikan doa, dukungan, semangat, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai dengan saat ini.
- Adikku Muhammad Naufal Yannassandi dan Amanda Salma Sephia Triahaddini yang juga selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat selama mengerjakan tugas akhir ini.
- Kepada kucing tersayang Momilio Bala Bala Muezza yang selama ini selalu menghibur ketika sedang lelah selama mengerjakan tugas akhir ini.
- Keluarga Hassan Ibrahim, Pak Yudi, Bu Tera, Pak Tono, Bu Dian, Pak Wahyu, Bu Vivi, Mas Kaka, Mbak Wulan, Mas Wildan, Mbak Sarah, Dek Nana, Mas Yafi, Mas Aldo, Mbak Ria, Dek Jihan, Mas Vandii, Mas Rian atas seluruh doa, nasihat, masukan, dan semangatnya selama ini.
- Dosen Pembimbing paling baik dan sabar Bu Budiarsih S.H., M. Hum., Ph. D atas seluruh arahan, masukan, saran, doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- Bu Wiwik Afifah, S. Pi., S. H., M. H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah mendorong saya untuk ikut berbagai kegiatan dari mulai menjadi MC di kegiatan fakultas, mengikuti berbagai lomba, kegiatan penulisan, kegiatan MBKM, dan berbagai kegiatan lainnya sehingga banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Sahabat-sahabat terbaik selama diperkuliahan Dedi Martua Siregar, Nada Biyan Naritha, Riris Lukitasari, Rizal Dwi Novianto, Naufal Adi Pratama

yang selama ini selalu jadi teman belajar, bertukar pikiran, berkeluh-kesah, terima kasih atas seluruh doa dan dukungannya selama proses perkuliahan dan proses menyelesaikan skripsi ini.

- Seluruh teman-teman kelas D Semester 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan banyak cerita dan kebahagiaan selama menjadi mahasiswa.
- Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2018.
- Dan kepada seluruh teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt atas rahmat dan ridhonya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya yaitu“ **KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN**”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Budiarsih, S.H., M. Hum, Ph. D. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu melayani segala administrasi selama proses penelitian ini, dan
5. Semua pihak yang telah membantu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Surabaya, 13 Januari 2022

Penulis

ABSTRAK

Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Sistem Jaminan Sosial Nasional masih di rasa memberatkan beban masyarakat . Dalam menerapkan hak atas kesehatan, pemerintah masih belum melaksanakannya dengan baik dan maksimal, masih banyak masyarakat yang mengeluh kesulitan membayar iuran BPJS terutama ditengah pandemi, meski begitu pemerintah malah mengeluarkan kebijakan kenaikan iuran BPJS. Dengan realitas tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah kebijakan kenaikan iuran BPJS dalam prespektif perundang-undangan dan bagaimanakah kebijakan kenaikan iuran BPJS dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji kebijakan kenaikan iuran BPJS untuk dapat menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa kebijakan kenaikan iuran BPJS seakan tidak memperhatikan amanat dari perundang-undangan lain di atasnya dan kebijakan kenaikan iuran BPJS juga akan berpotensi menghambat pemenuhan hak atas kesehatan seluruh masyarakat karena hanya mereka yang memiliki daya beli tinggi saja yang dapat terjamin hak atas kesehatannya.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Atas Kesehatan, Jaminan Sosial.

ABSTRACT

The policy of increasing BPJS Contributions for the National Social Security System is still considered a burden on the community. In implementing the right to health, the government still has not implemented it properly and optimally, there are still many people who complain about the difficulty of paying BPJS contributions, especially in the midst of a pandemic, even so the government has issued a policy to increase BPJS contributions. With this reality, the authors are interested in examining how the policy for increasing BPJS contributions is from a statutory perspective and how is the policy for increasing BPJS contributions in an effort to fulfill the right to health. In this study the author uses normative legal research, in this study the author will examine the policy of increasing BPJS contributions to be able to answer legal issues and provide prescriptions. The results of this study the authors conclude that the policy of increasing BPJS contributions does not seem to pay attention to the mandate of other legislation above and the policy of increasing BPJS contributions will also have the potential to hinder the fulfillment of the right to health for the entire community because only those who have high purchasing power can be guaranteed the right to health care his health.

Keywords: Human Rights, Right to Health, Social Security.

Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Penelitian	6
1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Asasi Manusia	11
2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	11
2.1.2. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia	12
2.1.3. Kewajiban Negara Dalam Hak Asasi Manusia	13
2.1.4. Sejarah Hak Asasi Manusia	13
2.1.5. Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia	16
2.2. Hak Atas Kesehatan	18
2.2.1. Pengertian Hak Atas Kesehatan	19
2.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Hak Atas Kesehatan	19

2.2.3. Dasar Hukum Ketentuan Hak Atas Kesehatan Internasional Dan Nasional	20
2.2.4. Prinsip Umum Hak Atas Kesehatan	21
2.3. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)	22
2.3.1. Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	22
2.3.2. Landasan Filosofi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	23
2.3.3. Landasan Sosiologi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	24
2.3.4. Asas Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	24
2.3.5. Program Sistem Jaminan Sosial Nasional	24
2.3.6. Organ Sistem Jaminan Sosial Nasional	25
2.3.7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	26

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Kenaikan Tarif Iuran Bpjs Dalam Perspektif Perundang-Undangan	29
3.1.1. Kebijakan Penentuan Tarif Iuran BPJS	29
3.1.2. Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Perundang-Undangan	34
3.1.3. Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Iuran BPJS Kesehatan	40
3.1.4. Kebijakan Kenaikan Iuran Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan	43

3.2. Kebijakan Kenaikan Iuran Bpjs Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan.	55
3.2.1. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Sebagai Pendukung Tercapainya UHC (Universal Health Coverage)	55
3.2.2. UHC (Universal Health Coverage) Dalam Memenuhi Hak Atas Kesehatan	59
3.2.3. Pembiayaan Kesehatan Sebagai Pendukung Tercapainya UHC (Universal Health Coverage)	64
3.2.4. Model Pembiayaan Kesehatan BPJS Melalui Mekanisme Asuransi	71
3.2.5. Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Kesehatan	73

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	81

DAFTAR BACAAN